PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada
Program Studi Manajemen Pendidikan
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Pendidikan

Taufiq Nurbakin
Q. 100.100.160

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

TESIS BERJUDUL

PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh

TAUFIQ NURBAKIN

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 26 Juli 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Sutama, M.Pd

Anggota Dewan Penguji Lain

Prof. Dr. Yetty Sarjono, M.Si

Pembimbing Pendamping I

Dr. Suyatmini, M.Si

Pembimbing Pendamping II

Surakarta, 13 Agustus 2012

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Program Pascasarjana
Direktur,

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.

PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Oleh:
[1] Taufiq Nurbakin, [2] Sutama
[1] Staf Dinas Pendidikan Kota Magelang
[2] Staf Pengajar UMS Surakarta

Abstract

The objective of this research are to describe (1) characteristic of fund resource in Education Office at Magelang, (2) characteristic of fund allocation and usage in Education Office at Magelang, (3) characteristic of fund accountability in Education Office at Magelang. This is qualitative research nad used ethnography design. Data collection method used depth interview, participation observation, and documentation. Data analysis is started from (1) data collection, (2) data reduction, (3) data display, and (4) drawing conclusion. Data validity test used triangulation. Result of the research are (1) fund resource in Education Office at Magelang is come from three sources that is APBN centre, APBD province, APBD Magelang. The amount of fund resource to be received by Education Office at Magelang is above 20 % from each budget. To get fund resource, the manager of financial in education office at Magelang city is compile RKA that evaluated by TAPD and DPRD of Magelang City which will be determined to be DPA. (2) Allocation and usage of educational funds in the Education office at Magelang done by taking into the needs. Funds allocation arranged for two categories that are indirect expenditure and direct expenditure. In January, funds allocation is arrangement, after the fund is set, it can be used in February. Use of funds made per quarter each year. 3) Accountability of education fund in Education office at Magelang City accountability prepared in the reports form signed by the Head and treasurer of Education office in Magelang. Report prepared by taking into account the legal aspects of legality and usefulness. The accountability results will be reported to DPKK no later than the 10 date of next months.

Keywords: *fund source, allocation, usage, accountability.*

PENDAHULUAN

Secara umum saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar, seperti rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dan lemahnya manajemen penyelenggara pendidikan, baik di lembaga formal maupun informal (Toyaman dan Usman, 2004: 1). Penjabaran tekad untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima ke dalam perencanaan yang lebih teknis

dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebagai penangungjawab penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Pembangunan Nasional Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2000-2004. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan. Dengan harapan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Renstra tersebut dijabarkan kembali ke dalam Renstra Daerah (Renstrada) dengan mempertimbangkan Pola Dasar (Poldas) Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Kompas dalam Toyaman dan Usman (2004: 2).

Dalam rangka melaksanakan tujuan pendidikan nasional secara nyata maka sangat diperlukan adanya penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai baik dari sudut perangkat lunak (misalnya kurikulum), serta perangkat keras (misalnya alat peraga, buku laporan, peralatan laboratatorium, dan sebagainya) maupun prasarana pendidikan dalam hal ini baik fisik maupun non fisik. Secara keseluruhan pengadaan fasilitas pendidikn termaksud tentunya dapat dipenuhi dengan adanya sumber pembiayaan, dengan kata lain pembiayaan merupakan kunci utama dalam rangka menyukseskan pencapaian tujuan pendidikan nasional (Depdiknas, 1998: 66)

Persoalan pendidikan secara nasional sebagaimana digambarkan di tasmuncul juga di tingkat daerah. Kemampuan dan tekan pemerintah daerah (pemda) yang saat ini juga masih menghadapi banyak hambatan. SDM pengelola pendidikan di banyak daerah dinilai belum sepenuhnya siap, kebanyakan mereka masih berada pada saat taraf sebagai pelaksanan saja. Keadaan ini dipersulit oleh terbatasnya anggaran, sehingga untuk beberapa tahun ke depan pengelolaan dan pembangunan pendidikan di Indinesia diperkirakan belum akan mnegalamai perbaikan yang berarti.

Biaya pendidikan tidak dapat disamakan dengan pengeluaran uang oleh lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan sekolah. Lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan sekolah boleh saja mengeluarkan uang melebihi kebutuhan yang

seharusnya untuk menyelenggarakan pembelajaran. Bahkan kondisi tersebutlah yang biasa terjadi pada berbagai dinas pendidikan, lembaga pendidikan dan sekolah yang ada di tanah air (Harsono, 2007: 9).

Sekarang ini muncul kritik akan mahalnya biaya pendidikan. Banyak anggot masyarakat yang menolak biaya pendidikan, biaya pendidikan dikatakan sebagai sesuatu yang mahal. Sejak dulu biaya pendidikan akademis tidak pernah murah. Yang membuat biaya pendidikan terlihat tinggi karena dibandingkan dengan penghasilan rata-rtaa rakyat Indonesia. Anehnya, beberapa komponen masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi menolak pebiayaan pendidikan yang murah, indikatornya mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri, yang notabene biaya pendidikan yang harus dipikul lebih mahal. Biaya pendidikan yang mahal itu dijadikan indikator prestise bagi mereka (Harsono, 2007: 10).

Dalam skala mikro, manajemen keuangan dapat meningkatkan nilai organisasi. Namun, di skala makro, manajemen keuangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara. Manajemen keuangan pendidikan tidak hanya membahas mengenai sumber dana yang diperoleh dan digunakan untuk proses pendidikan, namun, juga membahas mengenai berbagai persoalan (resiko) yang terkait dengan pengelolaan keuangan, serta berbagai upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelangsungan organisasi (Bastian, 2007: 3).

Pengelolaan biaya/keuangan yang tepat dan cepat, bukanlah tugas yang mudah bagi Depdiknas yang memiliki skala organisasi yang besar, sebaran geografis yang luas dan kewenangan perbendaharaan yang terdesentralisasi dangan jumlah kantor/satuan kerja yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah satker dan anggaran yang besar tersebut, memerlukan sistem pengelolaan biaya/keuangan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran organisasi setiap satuan kerja secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan (Amalia, 2008: 8). Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi

keuangan. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu me*mperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban* (Lipham, 1985; Keith, 1991).

Data mengenai pembiayaan dipresentasikan dalam tiga hal. *Pertama*, keseluruhan biaya pendidikan di Indonesia yang terdiri atas, (a) dana pemerintah diluar anggaran pemerintah pusat, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan, (b) pembayaran atau kontribusi dari siswa/keluarga; dan (c) sumber-sumber pembiayaan lain yang tidak selalu disediakan oleh sekolah. *Kedua*, biaya sistem pendidikan, yaitu suatu kombinasi dana-dana pemerintah dan ketersediaannya untuk memenuhi kontribusi bagi pengeluaran sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga siswa atau sumber-sumber lain. *Ketiga*, dana yang dibelanjakan untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji, barang-barang lain, dan berbagai pelayanan di SD, SLTP, dan SM (Sagala, 2006: 189).

Sumber pembiayaan merupakan ketersedian sejumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggara pendidikan (Hamadah, 2009: 2). Sumber-sumber pembiayaan pendidikan (penerimaan) diantaranya Sumber Dari Pemerintah Pusat Dan Daerah, Sumber Dari Masyarakat, serta Sumber-Sumber Lain yang bersal dari bantuan.

Alokasi dan penggunaan dana pendidikan dalam penelitian ini adalah kegiatan penganggaran dana pendidikan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budgting*) (Fatah, 2009: 47). Berdasarkan dokumen-dokumen UU No 14 tahun 2003 tentang perhitungan anggaran Negara tahun 2001, UU no 21 tahun 2002 tentang perubahan atas UU no. 19 tahun 2001 tentang APBN tahun 2002 dan UU no. 29 tahun 2002 tentang APBN TA 2003 alokasi dana pendidikan dirinci berdasarkan sector dan subsector. Bidang pendidikan termasuk dalam sector pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, Pemuda dan Olah raga. Sektor ini dibagi ke dalam 4 subsektor, yaitu 1) Pendidikan, 2) Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan, 3) Kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan 4) Pemuda dan olah raga.

Pertanggung jawaban dana pendidikan adalah kegiatan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunan dana pendidikan. Bagaimanapun Dinas Pendidikan harus menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak yang memberikan biaya pendidikan yang dikelola oleh dinas pendidikan (Harsono, 2007: 96). Misalnya dana berasal dari komite sekolah, maka laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan seperti kepala Dinas atas pemanfaatan dana itu (Harsono, 2007: 96).

Penelitian mengenai pengelolaan biaya pendidikan pernah dilakukan oleh Jordan etc (1997) dalam jurnal penelitian yang berjudul *Audit Report Modifications For Changes In Accounting Principles: Are Auditors Too Enthusiastic?*. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, auditor tidak menahan ukuran materialitas digunakan, auditor menunjukkan kecenderungan tinggi untuk memodifikasi laporan untuk perubahan pada prinsipnya menghasilkan efek tradisional dianggap tidak material. Hal ini menunjukkan bahwa auditor membuat laporan keuangan dengan melakukan perubahan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan material maupun non material.

Penelitian yang dilakukan oleh Lunenburg (2010) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Financial Controls: A Safeguard Against Misuse of Public Funds*, penelitian ini membahas mengenai kontrol atau pengawasan untuk Menjaga mencegah Penyalahgunaan Dana Publik. Penelitian yang dilakukan Fahy (2011) dalam jurnal internasional yang berjudul *Education Funding in Massachusetts: The Effects of Aid Modifications on Vertical and Horizontal Equity*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kabupaten seperti kekayaan masyarakat dan sistem sekolah daerah dapat meningkatkan besarnya bantuan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan Johnstone (2004) dalam jurnal internasional yang berjudul *Higher Education Finance and Accessibility: Tuition Fees and Student Loans in Sub-Saharan Africa*. Penelitian ini membahas mengenai pemerintah Afrika yang meningkatkan pajak untuk dialokasikan untuk kepentingan pendidikan sehingga siswa yang bersekolah tidak mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi.

Penelitian Waggoner (2009) dalam jurnal internasional yang berjudul *Learning about the School Budget: A Constructivist Model*, Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jika persiapan anggaran keuangan sekolah dilakukan dengan efektif maka semua aspek yang berkaitan dengan sekolah akan berjalan baik pula dan pengelola keuangan akan paham apa yang harus mereka lakukan. Penyususnan Anggaran keuangan sekolah yang dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun untuk memecahkan masalah-masalah keuangan sekolah merupakan salah satu cara efektif bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana anggaran dapat berdampak pada operasional sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan biaya pendidikan di Dinas pendidikan Kota Magelang, mengingat Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan. Fokus dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Karakteristik Pengelolaan Biaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang ".

Tujuan penelitian ini adalah a) mendeskripsikan karakteristik sumber dana di Dinas Pendidikan Kota magelang, b) mendeskripsikan karakteristik alokasi dan penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang, dan c) Mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Desain penelitian ini adalah etnografi, yang merupakan proses penjelasan menyeluruh tentang kompleksitas kehidupan kelompok (Sumkadinata, 2007: 107). Dalam penelitian ini kedudukan peneliti sebagai instrumen penelitian (Sutopo dalam Harsono, 2008: 158) dan sebagai murid (dalam Harsono, 2008: 158). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai rencana anggaran dan pembelanjaan biaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kota

Magelang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kasubag Keuangan, Kasubag Program dan Bendahara.

Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan partisipasi dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka terhadap informan. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tulisan, rekaman seperti buku-buku pedoman, laporan resmi, catatan harian, notulen rapat.

Analisis data adalah data tertata dalam situs untuk dideskripsikan. Data dikumpulkan, dikelompokkan berdasarkan sumber budaya. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (2007: 16) yang terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data (*data* reduction), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), biasa dikenal dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari teknik/metode pengumpulan data yang satu dengan teknik/metode yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Sumber Dana di Dinas Pendidikan Kota Magelang

Sumber dana yang berasal dari APBN pusat diberikan melalui dana BOS, DPPID, DAK, dan DAU. Dana yang berasal dari APBD provinsi diberikan melalui bantuan pemerintah provinsi (Banprov) dan juga dana bantuan gubernur (Bangub). Sedangkan untuk sumber dana dari APBD Kota Magelang diberikan sesuai dengan pagu anggaran masing-masing SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah).

Dana APBN dari pemerintah pusat dalam bentuk dana BOS merupakan dana bantuan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang. Salah satu penggunaan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan adalah tersedianya alat-alat peraga di 21 Sekolah dasar di Kota

Magelang. Manfaat dari adanya bantuan dana dari pemerintah tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahy (2011) dalam jurnal internasional yang berjudul *Education Funding in Massachusetts: The Effects of Aid Modifications on Vertical and Horizontal Equity*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kabupaten seperti kekayaan masyarakat dan sistem sekolah daerah dapat meningkatkan besarnya bantuan yang diberikan.

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Fahy (2011) dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Magelang memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai bantuan dana dari pemerintah yang digunakan untuk sektor pendidikan yang diharapkan berdampak positif bagai peningkatan mutu pendidikan. Hanya saja dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahy (2011) menjelaskan dampak dari dana yang diberikan pemerintah bagi siswa dimana kompetensi siswa meningkat dari dana yang diberikan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Magelang lingkup penelitiannya lebih besar yaitu di Dinas Pendidikan yang menaungi sekolah-sekolah yang tidak hanya membahas mengenai dampak dari adanya bantuan dana dari pemerintah. Namun membahas mengenai sumber dana yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang yang bersumber dari APBN dan APBD .

Besar sumber dana yang diberikan baik dari pusat, provinsi, maupun kota sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu permendagri nomor 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa besar sumber dana yang akan diterima oleh lembaga pendidikan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Magelang diatas 20% dari APBN. Sehingga tiap tahunnya bisa berubah-ubah. Hal ini disebabkan kebutuhan yang tidak sama dari tahun ke tahun.

2. Karakteristik Alokasi dan Penggunaan Dana Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang

Alokasi dana di Dinas Pendidikan Kota Magelang digunakan untuk semua sekolah yang berada di kota Magelang yang tersebar di 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Alokasi dana khusus digunakan untuk kegiatan belanja langsung dan tidak langsung. Penelitian mengenai alokasi dana juga dilakukan oleh Waggoner (2009) dalam jurnal internasional yang berjudul *Learning about the School Budget: A* Constructivist *Model*, Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jika persiapan anggaran keuangan sekolah dilakukan dengan efektif maka semua aspek yang berkaitan dengan sekolah akan berjalan baik pula dan pengelola keuangan akan paham apa yang harus mereka lakukan. Penyususnan Anggaran keuangan sekolah yang dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun untuk memecahkan masalah-masalah keuangan sekolah merupakan salah satu cara efektif bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana anggaran dapat berdampak pada operasional sekolah.

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Waggoner (2009) dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Magelang memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai alokasi dana yang berpedoaman pada anggaran yang sduah ditetapkan. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Waggoner (2009) alokasi dana tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun, sehingga masalah-masalah kecil dapat diatas dengan perencanaan yang matang. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Magelang waktu kegiatan alokasi dana dilakukan pada bulan Januari setiap tahunnya. Bukan hanya alokasi dana saja yang dibahas, namun juga penggunaan dana tersebut yang digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.

3. Karakteristik Pertanggungjawaban Dana Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang

Pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat laporan penggunaan dana pendidikan yang disusun oleh pejabat pengelola keuangan di

Dinas Pendididikan Kota Magelang. Sebagai pengguna anggaran Kepala Dinas Pendididikan Kota Magelang bertanggungjawab penuh dalam pembuatan laporan penggunaan dana. Sedangkan bendahara bertanggung jawab dalam mengeluarkan dana yang dimiliki oleh Dinas Pendididikan Kota Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang yang melakukan kontrol dana melalui aktvitas pengecekan tersebut merupakan hal yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana pendidikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lunenburg (2010) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Financial Controls: A Safeguard Against Misuse of Public Funds*, penelitian ini membahas mengenai kontrol atau pengawasan untuk Menjaga mencegah Penyalahgunaan Dana Publik. Kontrol keuangan membantu pengelola sekolah dalam menjaga dan mengevaluasi penggunaan yang efisien dan efektif sumber daya keuangan. Pada pada penelitian ini akan di bahas dua metode pengawasan keuangan yang digunakan oleh kepala sekolah yaitu pengendalian internal dan audit keuangan.

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Lunenburg (2010) dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Magelang memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh atasan sebuah lembaga pendidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dikelola. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Lunenburg (2010) lingkup penelitian dilakukan di sekolah dimana akan program khusus untuk kegiatan pengawasan yaitu melalui program kegiatan pengendalian internal dan audit keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini dilakukan di Dinas Pendidikan, dimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas sebatas pengecekan dari laporan yang sudah disusun oleh tim pengelola keuangan. Untuk kegiatan pengendalian belum optimal dilakukan oleh Kepala Dinas misalnya saja seperti kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai aliran dana dan penggunaan dana di Dinas Pendidikan Kota Magelang.

Aspek yang dipertanggungjawabkan dalam mengelola dana di Dinas Pendididikan Kota Magelang meliputi aspek legalitas hukum dan juga aspek kebermanfaatan dana yang sudah dikeluarkan. Bentuk laporan sesuai dengan format yang sudah ditentukan dalam permendagri no 13 tahun 2006. Penyusunan laporan yang mencantumkan perubahan yang terjadi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh pengelola keuangan Dinas Pendidikan Kota Magelang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jordan etc (1997) dalam jurnal penelitian yang berjudul *Audit Report Modifications For Changes In Accounting Principles: Are Auditors Too Enthusiastic*. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa auditor atau pembuat laporan keuangan suatu lembaga menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk memodifikasi laporan sehingga terjadi perubahan yang mengacu pada prinsip akuntansi.

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Jordan etc (1997) dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Magelang memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai penyusunan laporan yang berisi perubahan dana yang akan digunakan untuk memnuhi kebutuhan pendidikan di Kota Magelang. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Jordan etc (1997) tujuan perubahan tersebut dilakukan agar terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dana, dan mempermudah dalam melakukan pertanggungjawaban. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Magelang pembuatan laporan pertangungjawaban yang berisi perubahan besar penggunaan dana dikarenakan karena kebuuthan yang mendesak sehingga ada program kegiatan yang mengalangi penambahan dan pengurangan dari alokasi dana yang sudah disediakan.

PENUTUP

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber dana di Dinas Pendidikan Kota Magelang berasal dari tiga sumber yaitu APBN pusat, APBD provinsi, dari APBD Kota Magelang. Besar sumber dana yang akan diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang di atas 20%

dari masing-masing anggaran belanja. Untuk mendapatkan sumber dana, pengelola keuangan Dinas Pendidikan Kota Magelang menyusun RKA yang akan dievaluasi oleh TAPD dan DPRD Kota Magelang yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPA. Ada kalanya Dinas Pendidikan Kota Magelang bekerja sama dengan sponsor dalam kegiatan tertentu untuk mendapatkan tambahan sumber dana. Sumber dana yang diterima akan digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung. Sumber dana yang diterima melalui rekening bank Dinas Pendidikan Kota Magelang akan dipublikasikan secara transparan melalui media cetak nasional.

2. Alokasi dan penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Alokasi dana disusun untuk dua kategori yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada bulan Januari dilakukan penyusunan alokasi dana, setelah ditetapkan maka segera dapat digunakan pada bulan Februari. Penggunaan dana dilakukan per triwulan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 persentase untuk belanja tidak langsung sebesar 79.62% yang digunakan untuk belanja pegawai dan sisanya sebesar 20.38% untuk belanja langsung yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
3. Pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala dan bendahara Dinas Pendidikan Kota Magelang. Laporan disusun dengan memperhatikan aspek legalitas hukum dan kebermanfaatan. Laporan pengelolaan dana pendidikan berisi rekapitulasi penggunaan belanja langsung dan tidak langsung berserta rinciannya. Hasil pertanggungjawaban akan dilaporkan kepada DPKK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Wali kota Magelang juga diinformasikan mengenai dana pendidikan yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD. Sebagai wujud tranparsansi dan akuntabilitas laporan dana dipublikasikan melalui media cetak atau surat kabar.

Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan kepada pemerintah, melakukan prioritas pengalokasian anggaran pada sector pendidikan sejalan

dengan cara penggunaan yang efisien dan professional, serta terbuka dan akuntabel. Pemerintah menunjukkan keterbukaan dan pengefesien dana pendidikan yang tersedia serta mencegah korupsi untuk menekan keboncoran anggaran serta melakukan pemantauan langsung tentang penggunaan dana pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan secara terbuka menyampaikan sumber sana,anggaran dana, alokasi dana dan penggunaan untuk sektor pendidikan kepada pelaku pendidikan dan masyarakat luas. Kepala Dinas Pendidikan juga berperan aktif dalam setiap kegiatan penyusunan anggaran, ataupun penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga kegiatan pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dapat dipantau dan masalah yang muncul dapat segera di selesaikan.

Pengelola Keuangan, melakukan setiap kegiatan pengelolan keuangan dengan jujur dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan sehingga terwujud goog governance di lingkungan Dinas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia. 2008. *Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah Di SDN 1 Mulyoagung Dan Man 1 Malang*. http://amalia07.files.wordpress.com/2008/07/tugas-manajemen-pendidikan.pdf. Diambil pada tanggal 16 Juni 2010.

Bastian. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah Sebagai Basis Kualitas Pendidikan*. http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-ind/materi%20kgi2007/isi/tgl%2027/M2/PM_2-1-Indra_Bastian-Manajemen_keuangan_sekolah-Rev.pdf. Diambil pada tanggal 16 Juni 2010.

Fatah, Nanang. 2009. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Harsono. 2007. *Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Surayajaya Press.

Harsono. 2008. *Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johnstone. 2004. *Higher Education Finance and Accessibility: Tuition Fees and* Johnstone. 2004. "Higher Education Finance and Accessibility: Tuition Fees and Student Loans in Sub-Saharan Africa". *Journal of of Social Science Research in Afri*. Vol. 2, No. 2, 2004. Pg: 11-36.

Jordan etc. 1997. "Audit Report Modifications For Changes In Accounting Principles: Are Auditors Too Enthusiastic?". *Academy of Accounting and Financial Studies Journal.* Volume 1 Number 2 . Pg: 7-16

Lunenburg. 2010. "Financial Controls: A Safeguard Against Misuse of Public Funds". *National Forum Of Educational Administration & Supervision Journal.* Volume 27, Number 4. Pg: 1-3

dministration & Supervision Journal. Volume 27, Number 4. Pg: 1-3

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sagala 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: PT Nimas Multima.

Sukmadinata, S. 2005. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Toyaman dan Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar.* http://www.smeru.or.id/report/field/alokasianggaranpendidikan/alokasianggaranpendidikan.pdf. Diambil pada tanggal 16 Juni 2010.

Waggoner. 2009. "Learning about the School Budget: A Constructivist Model". *Research In Higher Education Journal*. Vol 1 No 1. Pg: 1-11.